



## Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Ade Rahma Sari <sup>1)</sup>; Muhammad Arifin Nasution <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [aderahmasari03@gmail.com](mailto:aderahmasari03@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [31 Oktober 2022]

Revised [21 November 2022]

Accepted [13 Desember 2022]

### KEYWORDS

Evaluasi, Evaluasi Program, Prioritas Pembangunan

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Program prioritas pembangunan-2 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mengetahui realisasi capaian program, untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program, untuk mengetahui evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori evaluasi CIPP oleh Daniel Stufflebeam (1966), yaitu konteks, masukan, proses, hasil. Hasil penelitian ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan terjadinya refocusing APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan unit sekolah baru di tahun 2020, keterbatasan jumlah guru baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan jumlah beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam pelaksanaan program prioritas.

### ABSTRACT

North Sumatra Province-2 priority development programs for 2019-2023, namely increasing and fulfilling access to education. Evaluation of priority development programs in the education sector of North Sumatra Province is aimed at knowing the realization of program achievements, to find out the inhibiting factors in program implementation, to determine the evaluation of development priority programs in the education sector of North Sumatra Province. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The data obtained is then analyzed by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with the CIPP theoretical approach by Stufflebeam (1966), namely context, input, process, results. The results of this study have not gone well. This is due to the refocusing of the North Sumatra Province APBD for the construction of new school units in 2020, the limited number of teachers both in quality and quantity, the limited number of scholarships from the North Sumatra Provincial Government, and the lack of synchronization between OPDs in implementing priority programs..

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi: aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan fisik. Perencanaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mendefinisikan bahwasannya: Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan yaitu: pertama, karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna (*market failure*), maka kondisi masyarakat masih sangat banyak yang terbelakang tingkat pendidikannya menyebabkan mereka belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah mapan. Kedua, karena adanya ketidakpastian masa yang akan datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul di kemudian hari. Ketiga, untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan, baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga dalam jangka panjang akan terwujud proses pembangunan yang terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lainnya. (Sjafrizal, 2019:6).

Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik, maka dari itu dibentuklah suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dituntut kemampuannya

untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh OPD dalam jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, guna terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang baru bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi. Fungsi Koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dilakukan dalam hal koordinasi penyusunan dokumen perencanaan. Koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi penyusunan rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Penulis melihat 5 sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, ialah Prioritas Pembangunan-1: Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja; Prioritas Pembangunan-2: Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan; Prioritas Pembangunan-3: Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; Prioritas Pembangunan-4: Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; Prioritas Pembangunan-5: Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Kelima sasaran prioritas pembangunan tersebut, diimplementasikan ke dalam berbagai program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Secara khusus, penelitian ini hanya memfokuskan pada prioritas pembangunan-2 yaitu peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.

## LANDASAN TEORI

Penulis menemukan bahwa isu-isu strategis pada program prioritas pembangunan-2 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, ialah: 1) Rendahnya kualitas dan kompetensi guru, gaji guru honorer belum sesuai standar, dan belum meratanya distribusi guru; 2) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi; 3) Belum adanya link and match antara sekolah menengah kejuruan dan industri usaha; 4) Terbatasnya tenaga pendidik dan sarana prasarana fasilitas Sekolah Berkebutuhan Khusus/Sekolah Luar Biasa.

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu ialah teori evaluasi CIPP dari Stufflebeam. Evaluasi merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksana evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Stufflebeam (2003:12). Terkait dengan evaluasi program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, penulis menemukan permasalahan seperti masih rendahnya pelayanan pendidikan di Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Penulis juga menemukan permasalahan lain, yaitu belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan kualitas pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam peningkatan daya saing seperti masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah penting dilakukan karena untuk melihat suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada *output*, akan tetapi juga berorientasi pada *process* dan *outcome*.

## METODE PENELITIAN



Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Moleong (2017:6). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh penulis dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan, Ketua Komisi A DPRD, Dewan Pendidikan Provinsi, Tenaga Ahli Evaluasi RPJMD. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data dalam berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori, dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang selanjutnya dideskripsikan dan dikategorisasikan, kemudian membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program prioritas pembangunan bidang peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya adalah sebuah program yang dibuat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat daerah dengan menekankan pada sepuluh (10) indikator program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhitung dari tahun 2020. Dalam menjalankan program prioritas pembangunan daerah di bidang pendidikan, strategi, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1. Capaian indikator Prioritas Pembangunan Bidang Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan Tahun 2020**

| Indikator  | Target 2020 | Realisasi 2020 | Capaian    |
|--|-------------|----------------|------------|
| Angka Melek Huruf                                    | 99,38       | 99             | 99.80%     |
| Rata-rata Lama Sekolah                               | 9,97        | 9,5            | 97.18%     |
| Harapan Lama Sekolah                                 | 13,81       | 13,4           | 97.64%     |
| APK SM Sederajat                                     | 98,14       | 97,8           | 99.65%     |
| APM SM Sederajat                                     | 73,19       | 72,3           | 99.19%     |
| Nilai Rata-rata Ujian Nasional SM Sederajat          | -           | -              | Ditiadakan |
| Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 | 97          | 97             | 100.42%    |
| Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi                | 57,4        | 54,7           | 94.92%     |
| Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4    | 94,72       | 94,72          | 99.88%     |
| Persentase Guru SMK bersertifikasi                   | 43,4        | 43             | 96.22%     |

Sumber: Hasil Mid Term Review RPJMDSU Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Pendidikan menunjukkan hanya ada 1 indikator atau 10 persen yang telah mencapai target dan terdapat 9 indikator atau 90 persen yang belum tercapai target sesuai dengan RPJMD. Indikator yang tercapai adalah persentase guru SMA/LB berkualifikasi akademik S1/D4. Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah guru sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan jumlah guru pada tingkat SMA/SMK di Sumatera Utara. Semestinya disamping peningkatan kualifikasi guru maka harus di selaraskan dengan pertumbuhan kebutuhannya. Indikator ini ditetapkan sebesar 97, ini merupakan target yang optimis dan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan kesesuaian kualifikasi akademik guru sebagai bukti tercapainya target RPJMD.

Penulis melihat bahwa indikator nilai rata-rata ujian nasional untuk tingkat SM sederajat perlu direvisi menjadi tingkat kelulusan siswa karena pemerintah pusat telah merubah sistem ujian nasional.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sinkronisasi program dinas pendidikan provinsi yang semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten/kota agar memberikan kontribusi dalam pencapaian IKK maupun IKU Gubernur. Berdasarkan Indikator pada OPD dinas Pendidikan terdapat 2 indikator yang berhubungan langsung yaitu kualifikasi akademik guru dengan APK SM Sederajat yang menunjukkan bahwa masih belum berkontribusi secara signifikan terhadap capaian IKU gubernur.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur Sumatera Utara pada sektor pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah yang mana pada provinsi Sumatera Utara tahun 2020 terdapat sebesar 9,54 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,17%. Angka ini menunjukkan bahwa belum tercapai dan masih terdapat selisih sebesar 0,83%. Walaupun belum tercapai namun kinerja pada IKU angka rata-rata lama sekolah capaiannya cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa ketidaktercapaian yang dimaksud dibawah 1%. Namun masih perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah dikawasan Sumatra, angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara berada pada urutan ke-4.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1966) yang terdiri dari *Context, Input, Process, Product*.

### **Context**

Penulis melihat evaluasi *context* merupakan langkah pertama dalam penelitian model CIPP yang menjadi dasar dan berkaitan dengan latar belakang, tujuan program, serta strategi dan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan, (2002:287) menyebutkan bahwa evaluasi *context* menilai kebutuhan, masalah, aset, dan kesempatan dalam definisi lingkungan. Kebutuhan termasuk hal-hal yang diperlukan atau berguna untuk memenuhi suatu tujuan yang dipertahankan. Masalah adalah hambatan untuk mengatasi dan untuk memenuhi kebutuhan yang ditargetkan. Aset meliputi keahlian dan layanan, biasanya dapat diakses di daerah-daerah yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi tujuan yang ditargetkan.

Penulis menemukan bahwa evaluasi *context* menjadi salah satu penentu untuk melihat keefektifan suatu program. Adapun pelaksanaan program prioritas pembangunan bidang peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan dibentuk atas landasan hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya, penulis melihat terkait pelaksanaan program bidang peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan ini diarahkan kepada: 1) Pemberian Beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru; 2) Penambahan Gaji Guru Honoror; 3) Program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara; 4) Beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi; 5) Mendorong partisipasi BUMN/BUMD Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA disetiap kecamatan menyesuaikan dengan kebutuhan; 6) Pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah; 7) Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter di semua mata pelajaran/kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin terutama di sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara; 8) Penguatan tingkat satuan pendidikan SMA/SMK yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi revolusi industri 4.0. Keseluruhan program yang dirancang dan telah dituangkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 harus terus dikawal dan dievaluasi perjalanannya sehingga benar-benar dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program prioritas pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, hal tersebut terjadi karena adanya refocusing APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan unit sekolah baru di tahun 2020 sehingga tidak terjadi penambahan pada unit sekolah baru, kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring, keterbatasan jumlah guru baik secara kualitas maupun kuantitas, dan keterbatasan jumlah beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera utara.

### **Input**

Dalam menjelaskan indikator evaluasi *input*, penulis menggunakan pendapat Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan (2002:291-292) yang melihat *input* sebagai masukan untuk membantu menyusun suatu program, proyek, atau intervensi lainnya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada penerima manfaat. Penulis melihat bahwa evaluasi *input* harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan dan membantu para pengambil keputusan untuk mempersiapkan pendekatan yang dipilih untuk eksekusi.





Evaluasi terhadap masukan dilakukan untuk menilai masukan yang ada dalam program prioritas yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Tahun 2020 diantaranya sumber daya manusia sebagai agen pelaksana program dan sumber daya teknologi yang digunakan dalam keberhasilan pencapaian prioritas tersebut. Selain itu, masukan dalam suatu program juga termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kolaborasi antar OPD dalam program menjadi salah satu pemicu dari keberhasilan program prioritas yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Tahun 2020 karena yang sangat diperlukan dalam program ini adalah kolaborasi antar OPD yang harus terus terjaga dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat. Namun, hal tersebut belum terlaksana sehingga, menyebabkan faktor penghambat dalam pencapaian program prioritas bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Penulis juga menemukan bahwa faktor penghambat yang paling utama selama pelaksanaan program prioritas adalah kurangnya koordinasi antar OPD untuk menyamakan gerak langkah dalam perumusan program prioritas dan kurangnya keselarasan program serta kegiatan yang mengakibatkan rumusan-rumusan di dalam program prioritas itu belum sinkron. Kemudian, pihak OPD masih *Single fighter* tidak memahami tupoksi nya terhadap iku dan ikk maka, berakibat forum OPD tidak berjalan sehingga koordinasi, sinkronisasi menjadi hambatan dalam mencapai target, dan seharusnya bukan lagi koordinasi tetapi harus berkolaborasi, dan kolaborasi antar OPD itu lemah.

Penulis menginterpretasi bahwa pencapaian IKU dan IKK harus didukung oleh OPD terkait, khususnya target kinerja utama dalam hal akses pemerataan pendidikan. Hal ini tidak saja menjadi beban dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tapi juga bagian terpenting dari OPD lainnya, maka dari itu perlu dilakukan kolaborasi yang lebih baik antar OPD maupun dengan perguruan tinggi untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

### **Process**

Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan (2002:294) menjelaskan evaluasi *process* harus mendokumentasikan dan menganalisis biaya usaha, kemudian harus melaporkan bagaimana proses pengamatan dan menilai kualitas peserta. Penulis melihat bahwa *process* yang dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan yang dilakukan selama program prioritas yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Tahun 2020. Selain itu perlu juga mengidentifikasi hal yang menjadi hambatan atau masalah dalam program sehingga penulis dapat menganalisis lebih dalam pelaksanaan program prioritas.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara di evaluasi setiap 3 bulan sekali yang dinamakan Triwulan 1-4. Hal tersebut dalam pelaksanaan program prioritas sudah dilaksanakan tepat waktu, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program, diantaranya yaitu: kurangnya sinkronisasi antar opd dalam pelaksanaan program prioritas tersebut, terjadi refocusing APBD untuk pembangunan unit sekolah baru dikarenakan adanya pandemi Covid, keterbatasan jumlah guru tingkat SMA/SMK yang berkualitas dan kuantitas; pihak opd masih *single fighter* tidak memahami tupoksi nya terhadap IKU dan IKK, kemudian forum opd tidak berjalan sehingga koordinasi, sinkronisasi menjadi hambatan dalam mencapai target.

### **Product**

Realisasi hasil pencapaian program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi pencapaian dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jika disesuaikan dengan teori Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan (2002:279) evaluasi *product* mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan baik untuk membantu menjaga proses sesuai dengan trek dan menentukan efektivitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya ada 1 indikator atau 10 persen yang telah mencapai target yaitu persentase guru SMA/LB berkualifikasi S1/D4. Untuk realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sektor pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah yang mana pada tahun 2019 terdapat 9,45% dan di tahun 2020 terdapat 9,54% dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,17%. Angka ini menunjukkan bahwa belum tercapai. Walaupun belum tercapai dan masih terdapat selisih 0,83% namun kinerja pada IKU angka rata-rata lama sekolah capaian nya cukup signifikan, namun masih perlu ditingkatkan; Belum berjalan sepenuhnya dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut ada penyesuaian program-program di dalam RPJMD yang harus sama dengan perubahan RPJMD itu sendiri termasuk perubahan pada indikator

kinerja utama dan perubahan pada indikator kinerja khusus yang telah disesuaikan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa realisasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan OPD terkait sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengenai evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 belum sepenuhnya mencapai tujuan program dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam hasil tim *monitoring* dan evaluasi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya refocusing APBD untuk pembangunan unit sekolah baru, sehingga tidak terjadi penambahan pada unit sekolah baru, keterbatasan jumlah guru secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan jumlah beasiswa dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, pelaksanaan program prioritas masih belum sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sinkronisasi program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait daya dukung pencapaian IKU Gubernur di bidang prioritas pendidikan, namun hal tersebut tidak menjadikan program diberhentikan, tetapi akan terus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Sari, Ade Rahma. 2022. *Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi FISIP USU.
- Sjafrizal. 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stufflebeam, D., & McKee, B. 2003. *The CIPP Model for Evaluation. Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN)*.
- Stufflebeam, Daniel L. 2002. *"The CIPP Model for Evaluation". Evaluation in Education and Human Service, Boston: Kluwer Academic Publisher.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional